



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWIN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 662480

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.864.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 999.000.000
2. Tanah Seluas 1021 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 245 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah Seluas 1193 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
6. Tanah Seluas 44 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.000.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 160.000.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. 37.843.700**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 359.502.695**F. HARTA LAINNYA** Rp. 65.000.000

Sub Total Rp. 2.606.346.395



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.606.346.395

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.